



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024

KABUPATEN MAMUJU TENGAH



KATA PENGANTAR

Pujisyukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 disusun berdasarkan dokumen Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021–2026. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan menciptakan Good Governance dan CleanGovernment.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan potret terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2024 serta sekaligus sebagai evaluasi dan bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

BUPATI MAMUJU TENGAH,
H. ARAS TAMMAUNI



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
INSPEKTORAT

Alamat : Jln. Poros Mamuju – Palu, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah 91563
Email : inspektoratmateng89@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tanggungjawab kami terbatas pada hasil reviu berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Hasil Reviu ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Rekomendasi Hasil Reviu Sebagaimana terlampir.

Demikian hasil reviu ini disampaikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Topoyo, 26 Maret 2025

INSPEKTUR

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH



DR. H. MARIA K, S.Ag., M.Pd., MM., CGCAE., CIPA., CGRS

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 19731010 200003 1 005

Daftar isi

Kata pengantar	i
Pernyataan telah direviu	ii
Daftar isi	iii
Bab I pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Kondisi Geografi dan Demografi	2
1. Luas Wilayah Dan Batas Wilayah	2
2. Topografi.....	2
3. Geologi.....	3
4. Hidrologi.....	3
5. Demografi	4
1.5 Gambaran Umum.....	5
1.6 Sumber Daya Manusia (SDM)	8
1.7 Isu strategis	9
Bab II perencanaan kinerja	14
2.1 Visi Misi Kabupaten Mamuju Tengah	14
2.2 Tujuan Dan Sasaran	14
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	15
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan	17
2.5 Perjanjian kinerja 2024.....	18
Bab III akuntabilitas kinerja	21
3.1 Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja.....	22
3.2 Akuntabilitas Keuangan	35
Bab IV penutup.....	36
lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang capaian kinerja dan prestasi yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah selama tahun 2024.

2. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 adalah:

1. Mengukur capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program/kegiatan.

3. Mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk perbaikan di masa mendatang.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah kepada masyarakat.

1.3 Dasar Hukum

1. undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1.4 Kondisi Geografi dan Demografi

1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Kabupaten Mamuju Tengah terletak di Provinsi Sulawesi Barat pada posisi 10 47' 82" – 20 17' 31" Lintang Selatan dan 1190 08' 13" – 1190 24' 08" Bujur Timur. Kabupaten Mamuju Tengah memiliki luas wilayah sebesar 3.100,87 km² yang secara administratif terbagi ke dalam lima kecamatan. Dan memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Pasangkayu (Mamuju Utara); Selatan – Kabupaten Mamuju; Barat – Selat Makassar; Timur – Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Topografi

a) Kemiringan Lahan

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Mamuju Tengah bervariasi dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian antara 0-2.600 meter di atas permukaan laut (dpl). Di wilayah bagian barat merupakan kawasan pesisir pantai dengan topografi dataran rendah dan ketinggian <25 meter di atas permukaan laut (dpl). Kawasan ini merupakan fisiografi dataran erisional dan dataran koluvial yang subur dan telah berkembang menjadi Kawasan permukiman, pertanian, dan

perkebunan. Di beberapa tempat tampak adanya genangan yang menandakan drainase buruk dan rawan terhadap bencana banjir.

b) Ketinggian Lahan

Makin ke timur wilayah ini semakin tinggi dengan topografi perbukitan dengan torehan-torehan alur air yang pada saat terjadi hujan membawa aliran permukaan menuju sungai utama, yakni S. Budong-budong, S. Karama, dan S. Karosa. Pada wilayah perbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah ketinggian topografi mencapai ketinggian 2.600 meter dpl. Ketinggian tempat di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dikelompokkan menjadi beberapa kelas ketinggian sebagai berikut:

- (1) Kelas ketinggian 50 – 500 m dpl, seluas 159.700,40 Ha
- (2) Kelas ketinggian 500 – 1000 m dpl, seluas 61.820,40 Ha
- (3) Kelas ketinggian 1000 – 1500 m dpl, seluas 38.953,95 Ha
- (4) Kelas ketinggian 1500 – 2000 m dpl, seluas 32.089,89 Ha
- (5) Kelas ketinggian 2000 – 2600 m dpl, seluas 8.872,36 Ha

3. Geologi

a) Struktur dan Karakteristik

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Mamuju 2013 dan Lembar Pasangkayu 2014, skala 1:250.000 (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 2010) wilayah Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari 7 Formasi, yaitu Formasi Latimojong (Kls), Aluvium (Qa), Formasi Budong-Budong (Qb), Batugamping Koral (Ql), Batuan Terobosan (Tmpi), Formasi Lariang (TQp), Formasi Sekala (Tmps), Batuan Gunungapi Talaya (Tmtv), Batuan Gunungapi Lamasi (Toml), Formasi Pasangkayu (TQp), dan Kompleks Wana (TRw).

b). Potensi Kandungan

Sedang untuk kandungan geologi di Kabupaten Mamuju Tengah secara garis besarnya dibagi menjadi 2 (dua), yakni kelompok bahan galian konstruksi dan kelompok galian industri.

4. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dilalui oleh 7 sungai (pembinaan Sungai wilayah III) yang mengalir dari daerah perbukitan di bagian timur menuju ke daerah pesisir arah barat dan bermuara di perairan laut Selat Makassar. Sungai-sungai

tersebut adalah Sungai Budong-Budong, Sungai Lumu, Sungai Karama, Sungai Karossa, Sungai Benggaulu, Sungai Kamansi, dan Sungai Panggajoan. Dalam sistem kerja wilayah sungai, sungai-sungai di Kabupaten Mamuju Tengah ini termasuk dalam Wilayah Sungai (WS) Karama, yang meliputi DAS Karama, DAS Budong-Budong dan DAS Karossa. Hingga saat ini sungai-sungai tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan karena di wilayah ini belum banyak kegiatan pembangunan baik di bidang pertanian lahan basah maupun kegiatan industri yang banyak membutuhkan air baku dari badan air permukaan yang ada. Kondisi badan air permukaan di wilayah ini semakin terancam dengan adanya kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian rakyat di daerah tengah dan hulu DAS. Indikasi kerusakan DAS ini terbukti dengan seringnya terjadi banjir pada saat musim hujan. Oleh karena itu penataan daerah aliran sungai di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dan wilayah kabupaten sekitarnya sangat mendesak.

5. Demografi

1) Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016 mencapai 142.139 jiwa, kemudian menurun menjadi 143.946 jiwa (-3,69%) pada tahun 2017. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 145.756 jiwa (1,26%). Kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 143.272 jiwa (-1,73%) yang terdiri dari 74.239 jiwa laki-laki dan 69.033 jiwa perempuan, dan pada tahun 2020 menurun menjadi 138.130 (-2,7%) yang terdiri dari 71.422 jiwa laki-laki dan 66.708 jiwa perempuan. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Jika dilihat dari distribusi penyebarannya pada tahun 2019, jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Topoyo yaitu sejumlah 35.774 jiwa. Sedangkan sebaran jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Pangale sejumlah 15.072 jiwa. Adanya pengurangan jumlah penduduk disebabkan oleh mobilitas penduduk (pindah-datang), kematian, penghapusan dan anomali (data yang tidak aktif).

2) Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Kabupaten Mamuju Tengah memiliki angka kepadatan penduduk pada tahun 2016 yaitu 45,84 jiwa, menurun menjadi 46,42 jiwa pada tahun 2017. Kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 47,00 jiwa, menurun menjadi 46,20 jiwa pada tahun 2019, dan menurun menjadi 44,55 pada tahun 2020. Kepadatan penduduk ini mengikuti kenaikan dan penurunan jumlah penduduk tiap tahunnya.

1.5 GAMBARAN UMUM

Kabupaten Mamuju tengah merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB). Dilihat dari aspek historis, sejarah perjuangan pembentukan Mamuju Tengah, sehingga diharapkan mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urusan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerja dalam menjalankan fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan susunan pemerintah dalam mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Urusan tersebut meliputi :

- 1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, PUPR, Perumahan Rakyat, Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sosial.
- 2) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar meliputi Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan,

3) Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Transmigrasi.

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH		
Sekretariat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Inspektorat
BADAN		
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KECAMTAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kecamatan pangale
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		Kecamatang budong- budong
DINAS		Kecamtan topoyo
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Kecamatan tobadak
DINAS KESEHATAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kecamatan karossa
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PERHUBUNGAN	
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	

SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
DINAS SOSIAL	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PERIKANAN	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS PERHUBUNGAN	
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
DINAS PERIKANAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
RSUD		

4) Urusan Penunjang Pemerintahan meliputi Perencanaan dan Pembangunan, Urusan Penelitian dan Pengembangan, Keuangan, Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan.

1.6 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah, yang disajikan dalam dokumen Mamuju Tengah Dalam Angka Tahun 2025 yang rilis pada tanggal 28 februari 2025, jumlah pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten mamuju Tengah berjumlah 4.028 . jumlah tersebut merupakan jumlah total berdasarkan Tingkat kepangkatan dan jenis kelamin. Dan jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berjumlah 1.341, jumlah tersebut merupakan jumlah total berdasarkan Tingkat kepangkatan dan jenis kelamin.

Tabel 2.3.3
Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mamuju Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin (orang), Desember 2024
Number of Mamuju Regency Government's Civil Servants by Hierarchy and Sex (people), Desember 2024

Pangkat/Golongan/Ruang Hierarchy	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Golongan I/Range I			
1. I/A (Juru Muda/Junior Clerk)	0	0	0
2. I/B (Juru Muda Tingkat I/First Class Junior Clerk)	2	0	2
3. I/C (Juru/Clerk)	3	0	3
4. I/D (Juru Tingkat I/First Class Clerk)	5	1	6
Golongan II/Range II			
5. II/A (Pengatur Muda/Junior Supervisor)	19	3	22
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I/First Class Junior Supervisor)	38	14	52
7. II/C (Pengatur/Supervisor)	105	74	179
8. II/D (Pengatur Tingkat I/First Class Supervisor)	118	152	270
Golongan III/Range III			
9. III/A (Penata Muda/Junior Superintendent)	200	303	503
10. III/B (Penata Muda Tingkat I/First Class Junior Superintendent)	222	310	532
11. III/C (Penata/Superintendent)	221	353	574
12. III/D (Penata Tingkat I/First Class Superintendent)	352	526	878
Golongan IV/Range IV			
13. IV/A (Pembina/Administrator)	169	255	424
14. IV/B (Pembina Tingkat I/First Class Administrator)	209	253	462
15. IV/C (Pembina Utama Muda/Junior Administrator)	63	55	118
16. IV/D (Pembina Utama Madya/Middle Administrator)	2	0	2
17. IV/E (Pembina Utama/Senior Administrator)	1	0	1
Jumlah/Total	1.729	2.299	4.028

Tabel 2.3.4
Tabel Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin (orang), Desember 2024
Number of Mamuju Regency Government's Grade by Hierarchy and Sex (people), Desember 2024

Pangkat/Golongan/Ruang Hierarchy	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
I	0	0	0
II	0	0	0
III	0	0	0
IV	0	0	0
V	0	0	0
VI	0	0	0
VII	33	134	167
VIII	0	0	0
IX	284	860	1.144
X	5	25	30
XI	0	0	0
XII	0	0	0
XIII	0	0	0
XIV	0	0	0
XV	0	0	0
XVI	0	0	0
XVII	0	0	0
Jumlah/Total	322	1.019	1.341

Sumber. Mamuju Tengah Dalam Angka 2025

1.7 Isu Strategis

Isu strategis adalah faktor-faktor yang dianggap penting dan akan mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan di masa datang. Isu strategis tersebut dapat bersumber dari isu internasional, kebijakan nasional, kebijakan provinsi ataupun dari permasalahan pembangunan daerah. Hasil identifikasi isu strategis Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut.

Isu-isu global yang dapat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah lima tahun ke depan bersumber dari pandemik Covid-19, implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean. Isu-isu tersebut teridentifikasi sebagai berikut:

1. Penghapusan kemiskinan
2. Pelayanan kesehatan yang inklusif
3. Pelayanan pendidikan yang inklusif
4. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Penyediaan air minum dan fasilitas sanitasi
6. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif
7. Kesempatan kerja yang produktif
8. Infrastruktur yang tangguh
9. Industri yang inklusif
10. Ketimpangan ekonomi
11. Perumahan dan pemukiman
12. Produksi dan konsumsi berkelanjutan
13. Ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim
14. Pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
15. Degradasi hutan dan lahan serta keanekaragaman hayati
16. Masyarakat inklusif dan harmonis
17. Penanganan dampak pandemik Covid-19

Isu-isu nasional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah lima tahun kedepan terutama bersumber dari RPJMN 2020-2024 yang dapat diidentifikasi berdasarkan agenda pembangunan nasional yang termuat di dalamnya yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Isu-isu regional provinsi bersumber dari RPJMD Provinsi, terutama yang terkait dengan program prioritas Gubernur yakni:

1. Pengembangan Trans-Sulawesi
2. Program Desa Mandiri, Sehat dan Cerdas

Isu-isu strategis dari permasalahan pembangunan daerah adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia
2. Pengembangan infrastruktur dasar dan wilayah
3. Kemiskinan dan kesenjangan
4. Pembangunan pertanian, agribisnis dan agropolitan
5. Pengembangan UMKM
6. Perbaikan pelayanan publik
7. Tatakelola pemerintahan yang baik
8. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam
9. Penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat
10. Penguatan jalur logistik barang dan jasa unggulan daerah
11. Penguatan pemerintahan kecamatan
12. Pembangunan desa
13. Fasilitas jalur logistik produk dan jasa unggulan

Berdasarkan identifikasi dari level global, nasional, provinsi dan daerah tersebut diatas, terdapat rumusan isu yang berbeda tetapi substansinya sama, sehingga

diperlukan rumusan yang menggabungkan substansi yang relatif sama tersebut. Dengan demikian, hasil identifikasi isu strategis dapat ditunjukkan sebagai berikut.

1. Penghapusan kemiskinan dan kelaparan
2. Pelayanan kesehatan
3. Pelayanan pendidikan
4. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Penyediaan air minum dan fasilitas sanitasi
6. Pembangunan pertanian, agribisnis, agroindustri dan agropolitan
7. Pengembangan kesempatan kerja yang produktif
8. Pengurangan ketimpangan ekonomi
9. Pembangunan infrastruktur dasar
10. Pembangunan perumahan dan pemukiman
11. Penguatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
12. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
13. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam
14. Pemeliharaan ketertiban, ketenteraman, persatuan dan inklusifitas
15. Pengembangan daya saing SDM pemuda dan remaja
16. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
17. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
18. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik
19. Perbaikan sistem pelayanan publik
20. Komunikasi, informasi dan teknologi digital
21. Penguatan fasilitas jalur logistik produk dan jasa unggulan
22. Rehabilitasi dan perlindungan sosial
23. Pemberdayaan masyarakat
24. Penguatan pemerintahan kecamatan
25. Penguatan ketahanan desa
26. Penanganan dampak pandemik Covid-19

1.3.1 Prioritisasi Isu Strategis

Isu strategis yang telah diidentifikasi selanjutnya diberikan pembobotan melalui FGD yang di dalamnya masing-masing peserta memberikan penilaian terhadap

setiap isu berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk memprioritisasi isu strategis memiliki bobotnya masing-masing. Isu strategis yang memiliki nilai bobot paling tinggi menempati prioritas pertama dan berurut hingga yang terendah menempati prioritas terakhir.

NO	KRITERIA	BOBOT
1	Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	15
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	20
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	15
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15
5	Kesesuaian dengan program prioritas kepala daerah	20
6	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
	Total	100

Penilaian isu-isu strategis dengan menggunakan enam kriteria menghasilkan prioritas isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan dampak pandemik Covid-19
2. Pelayanan kesehatan
3. Pelayanan pendidikan
4. Penghapusan kemiskinan
5. Penyediaan air minum dan fasilitas sanitasi
6. Pembangunan infrastruktur dasar
7. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
8. Pembangunan pertanian, agribisnis, agroindustri dan agropolitan
9. Perbaikan sistem pelayanan publik
10. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik
11. Pemeliharaan ketertiban, ketenteraman, persatuan dan inklusifitas
12. Penguatan ketahanan bencana dan perubahan iklim

13. Pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam
14. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
15. Penguatan fasilitas jalur logistik produk dan jasa unggulan
16. Pengembangan kesempatan kerja yang produktif
17. Pembangunan perumahan dan pemukiman
18. Pengembangan daya saing SDM pemuda dan remaja
19. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
20. Penguatan pemerintahan kecamatan
21. Rehabilitasi dan perlindungan sosial
22. Pemberdayaan masyarakat
23. Pengurangan ketimpangan ekonomi
24. Penguatan ketahanan desa
25. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi Misi Kabupaten Mamuju Tengah

Visi

“ Mamuju Tengah Maju dan Sejahtera dalam Bingkai Lalla’ Tassisara “

Misi

- (1) Mendorong Pemenuhan Infrastruktur Dasar
- (2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar
- (3) Mendorong Daya Saing Perekonomian Daerah
- (4) Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik
- (5) Memelihara Persatuan dan Kesatuan Masyarakat
- (6) Menjaga Keberlanjutan Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup

2.2 Tujuan Dan Sasaran

Selanjutnya, ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2024 yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar secara merata antar wilayah dengan sasaran Terpenuhinya infrastruktur dasar dalam mendukung pemerataan pembangunan
2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar dalam mendukung kualitas hidup yang layak dengan sasaran Meningkatnya daya Saing Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah dengan sasaran Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, Berkembangnya kawasan agropolitan berbasis kota terpadu mandiri
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Meningkatkan ikatan kebersamaan dan kepatuhan norma hukum dengan sasaran Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
6. Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan sasaran Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati daerah .

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

No	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	terpenuhinya infrastruktur dasar untuk pemerataan pembangunan	1	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai Indeks	$(BxN \text{ kemantapan jalan kabupaten} + BxN \text{ Akses Air Minum Layak} + BxN \text{ Akses Sanitasi Layak} + BxN \text{ Pemukiman layak huni} + BxN \text{ Rumah Layak Huni} / 5) \times 100\%$	Laporan Kinerja DinasPU dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2	Meningkatnya daya Saling Sumber Daya Manusia	2	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	$(BxN \text{ Angka Rata-rata Lama Sekolah} + BxN \text{ Angka Harapan Lama Sekolah} + BxN \text{ Angka Harapan Hidup} + BxN \text{ Pengeluaran Perkapita} / 4) \times 100\%$	BPS Kabupaten Mamuju Tengah
		3	Prevalensi Stunting	Persen	Jumlah anak balita stunting pada tahun n / total jumlah anak balita yang diperiksa pada tahun n x 100%	Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	4	Angka kemiskinan (persen)	Persen	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - y_i}{Z} \right]^{\alpha}$ Dimana: $\alpha = 2$ Z = garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < Z$ q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk	BPS Kabupaten Mamuju Tengah
		5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Dimana: TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%) PP = Jumlah Pengangguran (orang) PAK = Jumlah Angkatan Kerja (orang)	BPS Kabupaten Mamuju Tengah

4	Berkembangnya kawasan agropolitan berbasis kota terpadumandiri	6	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	$R(t-1,t) = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ Dimana: $R(t-1,t)$ =laju pertumbuhan ekonomi (%) $PDRB_t$= Jumlah PDRB tahun t (Rp) $PDRB_{t-1}$= Jumlah PDRB tahun $t-1$ (Rp)	BPS Kabupaten Mamuju Tengah
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	7	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	Laporan Hasil Evaluasi KemenPAN RB	KemenPAN RB
		8	Nilai LPPD	Nilai	Hasil evaluasi LPPD	Bagian Pemerintahan Setda
		9	Opini BPK	Kategori	Hasil evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKPAD
6	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	10	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan	PERSEN	$PGK3 = \frac{GK3_{t-1} - GK3_t}{GK3_{t-1}} \times 100\%$ Dimana: PG K3 = Penurunan gangguan K3 $GK3_{t-1}$ = Jumlah gangguan K3 tahun sebelumnya $GK3_t$ = Jumlah gangguan K3 tahun ini	SATPOL
7	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati daerah	11	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (Nilai)	Nilai Indeks	$IKLHD = \frac{IKA + IKU + IKL}{3} \times 100\%$ Dimana: IKA: Indeks Kualitas Air IKU: Indeks Kualitas Udara IKL: Indeks Kualitas Lahan	Dinas Lingkungan Hidup

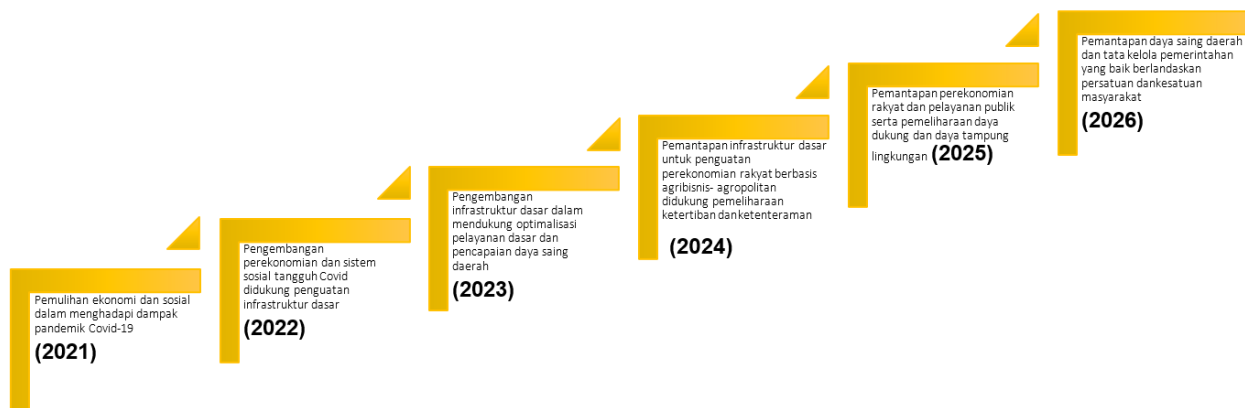


2.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 adalah sebagai berikut.

1. Mengefektifkan daya dukung infrastruktur transportasi dan perhubungan, informasi dan komunikasi, perumahan dan pemukiman, serta sumberdaya air sesuai karakteristik wilayah berbasis rencana tata ruang daerah.
2. Memenuhi ketersediaan data, sumberdaya manusia, dan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan SPM pelayanan dasar yang menjangkau semua target layanan.
3. Meningkatkan kemampuan literasi, resiliensi dampak pandemic dan penanganan 1.000 hari pertama kehidupan, serta daya beli masyarakat untuk hidup yang layak.
4. Memanfaatkan teknologi terkini dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, UMKM, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui peran efektif pelaku utama dan pelaku usaha.
5. Pelibatan multistakeholder dalam penanggulangan kemiskinan diiringi dengan penyerapan tenaga kerja dengan pendapatan di atas upah minimum.
6. Pengembangan sarana/prasarana dan fasilitas ekonomi pendukung dalam produksi dan pengolahan komoditas unggulan agribisnis berbasis keterkaitan pusat kota dengan kawasan perdesaan.
7. Percepatan implementasi road-map reformasi birokrasi dengan dukungan sistem elektronik yang mengintegrasikan data sektoral dan keuangan dari level perangkat daerah hingga pemerintah desa.
8. Penguatan sistem inovasi daerah dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan ekonomi melibatkan kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat sipil.
9. Penguatan modal sosial antar kelompok masyarakat untuk memanifestasikan kebersamaan dalam mendorong kemajuan daerah yang membawa kemaslahatan untuk semua.
10. Penyadaran pemangku kepentingan untuk pengendalian pencemaran, pencegahan degradasi lahan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, penanganan sampah dan limbah seiring dengan penegakan aturan lingkungan hidup.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah 2021-2026 pada dasarnya berisi prioritas pembangunan yang akan dijalankan setiap tahun. Setiap tahun dijalankan tema pembangunan tertentu, dan dalam payung tema pembangunan itu dikembangkan kebijakan pembangunan yang diprioritaskan. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan substansi yang menjadi tema setiap tahun adalah sebagai berikut.



2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH	
	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 Nomor : 13 / 007.1 / I/ 2024	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: H. ARAS TAMMAUNI
Jabatan	: BUPATI MAMUJU TENGAH
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.	
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.	
Mamuju Tengah, 02 Januari 2024	
 BUPATI MAMUJU TENGAH, ARAS TAMMAUNI	

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA	TARGET
1	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Untuk Pemerataan Pembangunan	Indeks Infrastruktur Daerah	78,08
2	Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	67,46
		Prevalensi Stunting	14
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Angka Kemiskinan	5,17
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1,80
4	Perkembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri	Pertumbuhan Ekonomi	5,17
5	Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	CC
		NILAI LPPD	2,99
		OPINI BPK	WTP
6	Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan	100
7	Terpeliharabya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Iklhd)(Nilai)	79

No	Program	Anggaran
1	Program Penyelenggara Jalan	Rp. 43.863.886.074
2	Program Pengelola Dan Pengembangan Sistem Air Minum	Rp. 17.337.373.025
3	Program Penyelenggara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Rp. 525.986.098
4	Program Kawasan Permukiman	Rp. 211.579.699
5	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 167.354.332
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 103.186.267.247
7	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 55.718.947.533
8	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 39.724.410
9	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 54.743.410
10	Program Perlindungan Dan Jaminan Social	Rp. 152.858.497
11	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 1.334.713.789
12	Program Peningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.550.600.000
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.14.697.372.303
14	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp. 591.857.162
15	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 86.790.918

Mamuju Tengah, 02 Januari 2024



BAB III

Akuntabilitas kinerja

Target-target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 diukur dan dianalisis tingkat keberhasilan atau kegagalan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang tercermin dalam capaian sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidak berhasilan sasaran program dilakukan dengan mengukur indikator sasaran program yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran strategis. Analisis capaian sasaran program difokuskan pada IKU yang merupakan indikator kinerja yang terkait langsung terhadap pencapaian sasaran program dan sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan 2 (dua) rumus, yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (**Progress Positif**), maka digunakan rumus:

% Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (**Progress Negatif**), maka digunakan rumus:

% Capaian = $\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100 \%$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel

Skala yang digunakan bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positif dan Negatif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik Sekali
2	85 s/d 100	Baik Sekali
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Cukup
5	<55	Kurang

3.1 Analisis Dan Evaluasi Pencapaian Kinerja

Pengukuran Kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)
1	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Untuk Pemerataan Pembangunan	Indeks Infrastruktur Daerah	78,8	57,61	73,10
2	Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	67,46	68,53	101,58
		Prevalensi Stunting	14	16,73	80,5
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Angka Kemiskinan	5,17	7,72	50,67
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1,80	1,70	105,5
4	Perkembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri	Pertumbuhan Ekonomi	5,17	2,98	57,64
5	Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	100
		NILAI LPPD	2,99	-	-
		OPINI BPK	WTP	WTP	100
6	Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan	100	100	100
7	Terpeliharabya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Iklhd)(Nilai)	79	73,32	92,82

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan beberapa tahun sebelumnya.

No	Sasaran	Iku	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Untuk Pemerataan Pembangunan	Indeks Infrastruktur Daerah	63	52	82,53	76,3	68,88	90,27	78,8	57,61	73,10
2	Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	67,00	66,89	99,8	67,14	67,45	100,46	67,46	68,53	101,58
		Prevalensi Stunting	8	14,69	16,37	15	14,89	100,73	14	16,73	80,5
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Angka Kemiskinan	6,30	7,17	13,80	6,13	7,32	80,58	5,17	7,72	50,67
		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,53	1,88	125,69	1,85	1,83	101,08	1,80	1,70	105,5

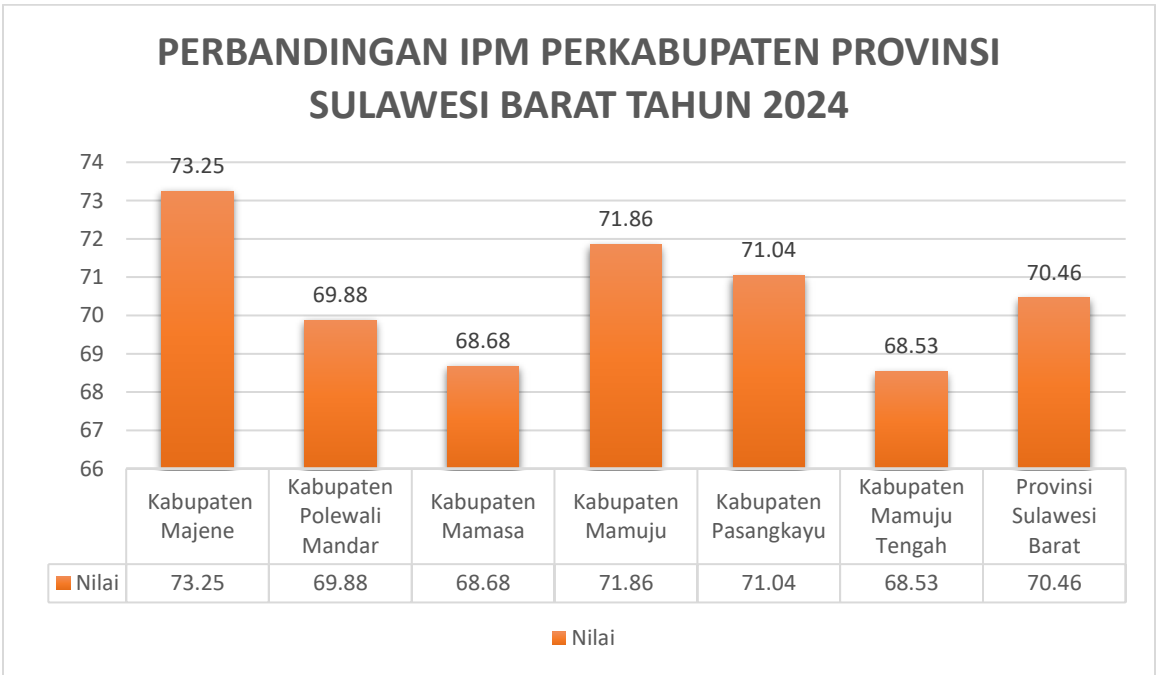
4	Perkembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri	Pertumbuhan Ekonomi	3,87	2,20	56,8	4,33	2,80	64	5,17	2,98	57,64
5	Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	C	Kurang	CC	C	Kurang	CC	CC	100
		NILAI LPPD	3	2,79	93				2,99		
		OPINI BPK	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
6	Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Terpeliharabya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragama n Hayati Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Ikldh)(Nilai)	75,00	55	91,66	75,29	78,56	104,34	79	73,32	92,82

3. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan target akhir RPJMD

No	Sasaran	Iku	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja Akhir RPJMD	Capaian Kinerja	Predikat
1	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Untuk Pemerataan Pembangunan	Indeks Infrastruktur Daerah	57,61	81,16	57,61	1,40	Kurang
2	Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	68,53	67,69	68,53	101,24	Sangat Baik Sekali
		Prevalensi Stunting	16,73	6,90	16,73	-42,46 %	Kurang
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Msyarakat	Angka Kemiskinan	7,72	5,50	7,72	59,64 %	Cukup
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1,70	2,44	1,70	130,33 %	Sangat Baik Sekali
4	Perkembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri	Pertumbuhan Ekonomi	2,98	6,15	2,98	48,45 %	Kurang
5	Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	cc	CC	Baik
		NILAI LPPD		3,04			Belum rilis nilai dari Kemendagri
		OPINI BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan	100	80	100	125 %	Sangat Baik Sekali
7	Terpeliharabya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Ikldh)(Nilai)	73,32	76,00	73,32	96,47 %	Baik Sekali

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Kabupaten Yang Ada Di Provinsi Sulawesi Barat

a. Indeks Pembangunan Manusia

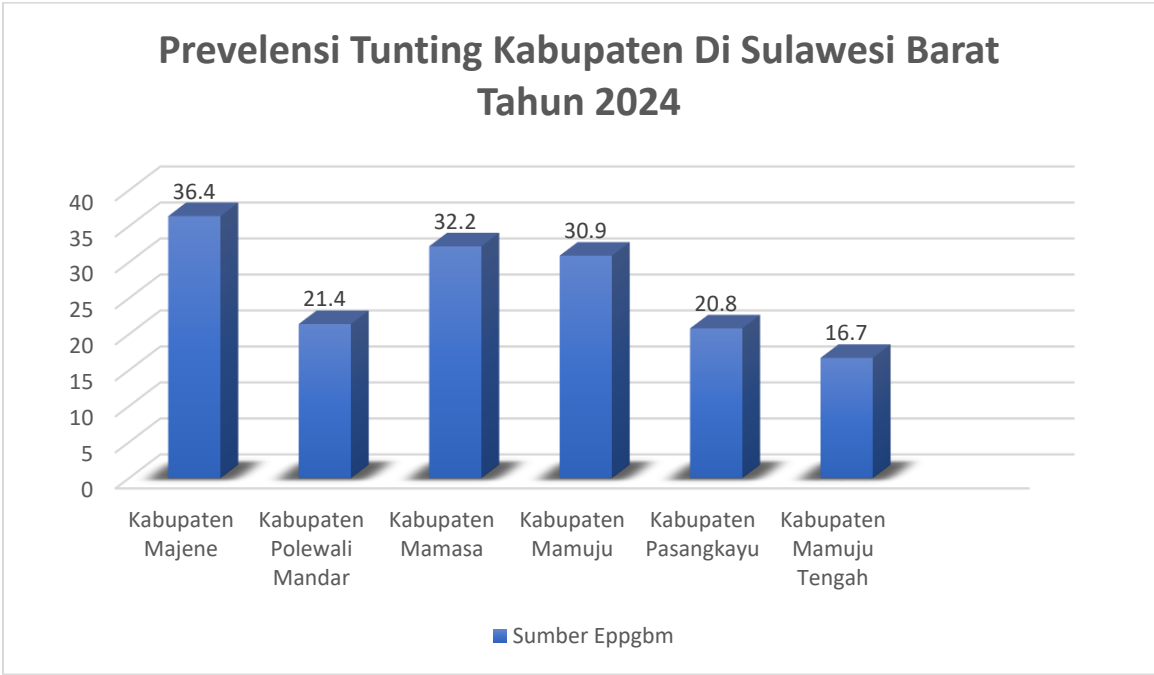


Dengan Realisasi, IPM sebesar 68,53, Kabupaten Mamuju Tengah menempati posisi ke-6 di antara 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, dengan Kabupaten Majene sebagai yang tertinggi dengan IPM sebesar 73,25.

Pada tahun 2024, IPM pada level kabupaten berkisar antara 68,53 (Mamuju Tengah) hingga 73,25 (Majene). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 70,05 (Mamuju Tengah) hingga 72,27 (Mamasa). Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 12,09 tahun (Pasangkayu) hingga 13,72 tahun (Majene), serta Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 7,72 tahun (Polewali Mandar) hingga 9,46 tahun (Majene). Sementara itu, pengeluaran riil per kapita di tingkat kabupaten berkisar antara 8,42 juta rupiah (Mamasa) hingga 12,19 juta rupiah (Pasangkayu).

IPM di tiga kabupaten di Sulawesi Barat berstatus “tinggi” dan tiga kabupaten lainnya berstatus “sedang” pada tahun 2024. Pada tahun 2024, pertumbuhan IPM tertinggi dicapai oleh Kabupaten Mamuju Tengah (1,33 persen) dan disusul Kabupaten Majene (1,12 persen) dan Kabupaten Mamuju (1,11 persen). Adapun pertumbuhan IPM terendah dicapai oleh Kabupaten Mamasa yaitu sebesar 0,79 persen dibandingkan tahun 2023.

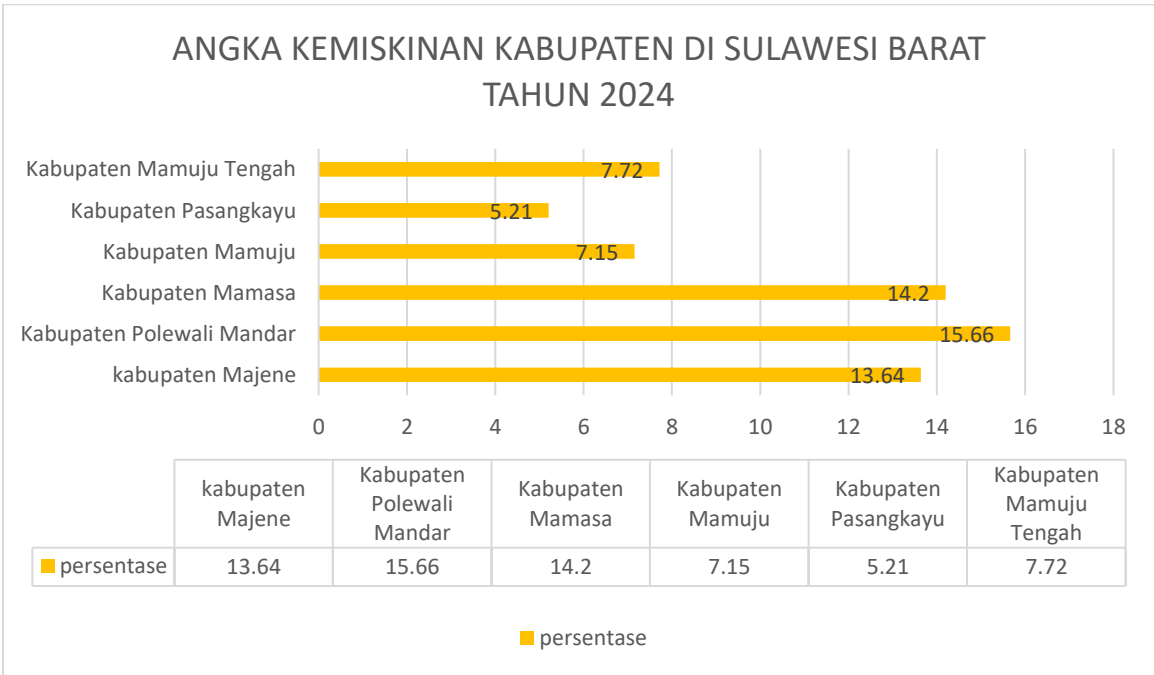
b. Prevelensi Stunting



Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa Kabupaten Mamuju Tengah telah mencapai keberhasilan yang signifikan dalam mengurangi angka stunting, dengan persentase sebesar 16,7%. Ini menunjukkan bahwa strategi dan program yang telah diterapkan oleh pemerintah dan stakeholder di Kabupaten Mamuju Tengah telah efektif dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak di wilayah tersebut. Kabupaten Majene, Mamasa, dan Mamuju masih memiliki persentase stunting yang relatif tinggi.

Selain itu, Kabupaten Pasangkayu dan Polewali Mandar juga telah menunjukkan kemajuan yang positif dalam mengurangi angka stunting, dengan persentase sebesar 20,8% dan 21,4%.

c. Angka Kemiskinan

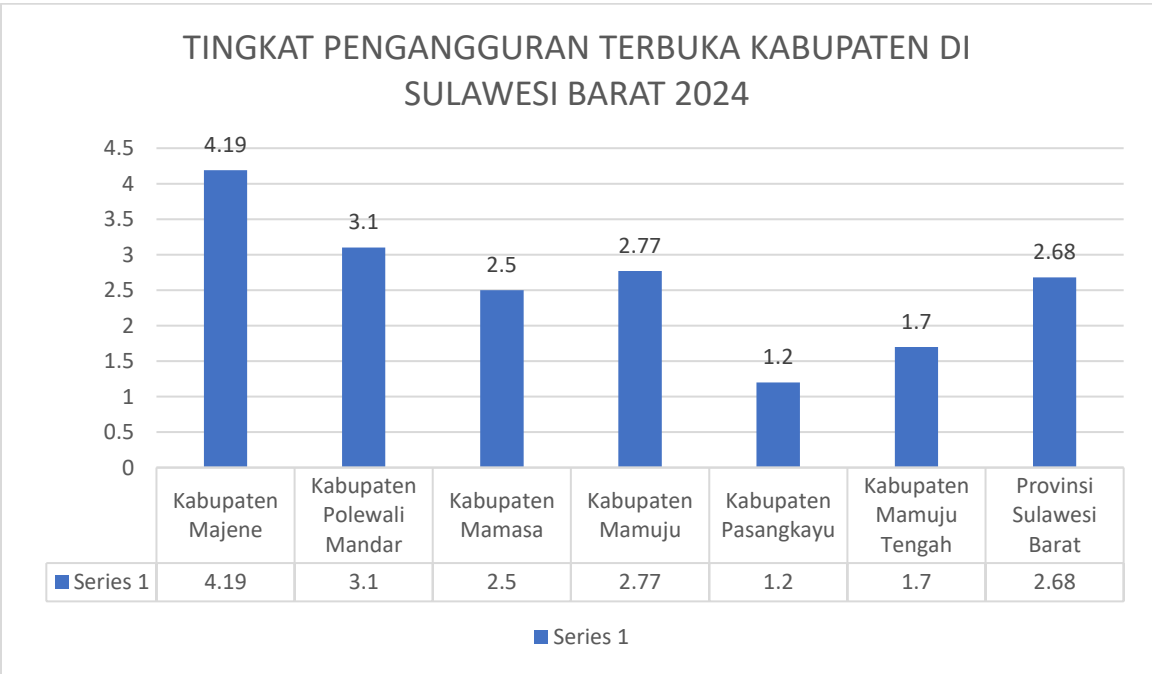


Persentase penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Tengah, data per 30 November 2024 tercatat 7,72 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase penduduk miskin di kabupaten/kota naik 0,4 persen. Perkembangan persentase penduduk miskin dalam 10 tahun di Kabupaten Mamuju Tengah dalam tren naik dari yang semula kemiskinan sebesar 6,86 persen menuju ke 7,72 persen.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk pada 2024 lalu di kabupaten/kota ini berjumlah 143,27 ribu jiwa. Dibandingkan dengan wilayah lain di Sulawesi Barat, persentase penduduk miskin di kabupaten/kota ini masuk dalam daftar urutan empat besar.

Wilayah lain dengan persentase penduduk miskin di urutan dua teratas di provinsi Sulawesi Barat adalah Kabupaten Polewali Mandar 15 persen dan Kabupaten Mamasa 14 persen.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka



terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Majene mencapai 4,19%, menempati posisi tertinggi di antara kabupaten-kabupaten di Sulawesi Barat. Di sisi lain, Kabupaten Pasangkayu memiliki TPT terendah, yaitu sebesar 1,20%. Kabupaten Mamuju Tengah juga memiliki TPT yang relatif rendah, yaitu sebesar 1,70%, Dan berada pada urutan ke dua terendah. Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju, dan Mamasa memiliki TPT yang relatif sedang, yaitu sebesar 3,10%, 2,77%, dan 2,5%.

Dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi TPT, pemerintah kabupaten Mamuju Tengah akan terus mengembangkan kebijakan yang tepat, seperti mengembangkan sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta meningkatkan akses ke pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, diharapkan TPT di Mamuju Tengah dapat terus menurun dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat.

5. **Analisis Penyebab keberhasilan /kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

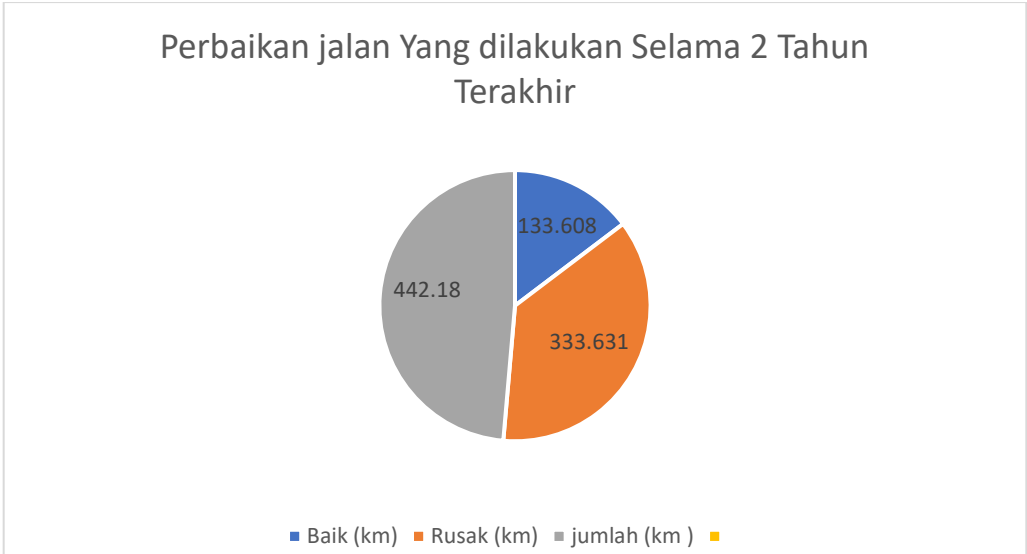
No	Sasaran	Iku	Tahun 2024			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Faktor Pendukung/Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Untuk Pemerataan Pembangunan	Indeks Infrastruktur Daerah	78,8	57,61	73,10	Penyebab Kegagalan 1. Bertambahnya persentase pengguna akses air bersih,hal ini dibuktikan melsalui data pelanggan menurut SPAM kabupaten mamuju Tengah tentang pelanggan pada tahun 2023 sejumlah 3.617 sedangkan pada tahun 2024 pelanggan PDAM yang dijelaskan sejumlah 4.255. dari data tersebut membuktikan bahwa jumlah pelanggan dari tahun 2023 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 638 pelanggan	Upaya pemenuhan kebutuhan air minum dan air baku lainnya dilakukan melalui pendataan sumber-sumber mata air baru dan peningkatan pembangunan prasarana air minum dengan jaringan perpipaan terlindungi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas air yang tersedia bagi masyarakat
						2. Penurunan layanan akses sanitasi karena Bertambahnya jumlah rumah tangga, pada tahun 2023 jumlah total rumah tangga berjumlah (28.623) dengan kategori akses dasar (4.386), akses aman SPALD-S (12.718), akses aman SPALD-T (1.790) dengan jumlah yang belum terlayani (23.447) jumlah capaian (86.39%), sedangkan untuk tahun 2024 jumlah total unit rumah berjumlah (28.834), akses dasar sebesar (4.363), akses aman SPALD-S (12.639), akses aman SPALD-T (1.790) dengan jumlah yang belum terlayani sebesar (23.466), jumlah capaian (80.15%)	Sosialisasi penyediaan lahan untuk kesiapan lokasi pembangunan prasarana MCK (Mandi, Cuci, dan Kakus) serta peningkatan pembangunan pengelolaan air limbah sekala kawasan dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat.
2	Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	67,46	68,53	101,58	keberhasilan IPM ini antara lain 1. Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang signifikan, tercermin dalam dimensi umur panjang dan hidup sehat. Salah satu indikator	Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan aksesibilitas fasilitas kesehatan yang memadai dapat berkontribusi pada peningkatan Umur Harapan Hidup

						utama, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, mencapai angka 70,05 tahun, menunjukkan harapan hidup yang lebih panjang dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakatnya.	masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat menikmati hidup yang lebih panjang dan sehat.
						2. Peningkatan aksesibilitas pendidikan dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Peningkatan kualitas guru dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan memahami kurikulum, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan guru yang profesional dan kompeten dalam menjalankan tugasnya.
		Prevalensi Stunting	14	16,73	80,5	Kegagalan dalam mencapai kesehatan yang optimal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya konsumsi makanan bergizi seimbang dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya asupan nutrisi sejak kehamilan pada ibu. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan ibu dan anak, serta dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.	Upaya pencegahan dan penanganan stunting dilakukan melalui berbagai program dan intervensi, termasuk pemberian tablet tambah darah pada remaja putri, skrining anemia, serta pemberian makanan tambahan lokal untuk ibu hamil dan balita yang mengalami masalah gizi. Selain itu, program seperti Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), lokakarya mini stunting, rembuk stunting, dan tim pendamping keluarga stunting (TPK) juga dilaksanakan. Inovasi seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dan pemberian makan bergizi kepada keluarga berisiko stunting melalui donasi orang tua asuh turut mendukung upaya ini.
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Angka Kemiskinan	5,17	7,72	50,67	Kegagalan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh pembatasan ekspor CPO (Crude Palm Oil) yang mempengaruhi sektor perkebunan, sehingga berdampak pada penurunan pendapatan dan kesejahteraan petani serta masyarakat sekitar. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial di daerah tersebut.	Meningkatkan sektor penopang selain sektor perkebunan, lapangan usaha ramah wanita kepala rumah tangga, pengurangan beban pengeluaran, pengendalian inflasi, dan prioritas infrastruktur dasar.
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1,80	1,70	105,5	Upaya meningkatkan jumlah lapangan kerja di sektor formal dan informal dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil, sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, serta mengurangi Tingkat pengangguran dan kemiskinan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan	Melakukan program-program perluasan kesempatan kerja dan memberikan pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi

						kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah	
4	Perkembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri	Pertumbuhan Ekonomi	5,17	2,98	57,64	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 tercatat sebesar 2,98 persen. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi di Mamuju Tengah pada tahun 2024 adalah Pengadaan Listrik dan Gas mencapai 12,95%. Jika ditinjau dari sisi pengeluaran, komponen pertumbuhan tertinggi adalah pengeluaran konsumsi LNPRRT sebesar 14,19%.	Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan berbagai upaya untuk mencapai pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 2,98 persen pada tahun 2024, termasuk pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor unggulan, peningkatan investasi, pengembangan pengadaan listrik dan gas, serta peningkatan pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRRT).
5	Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	100	Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/43/RB.04/2025 tentang Penyampaian Hasil Evaluasi RB 2024 menyampaikan tentang hasil evaluasi sementara Reformasi Birokrasi. Kabupaten Mamuju Tengah meraih Index RB sebesar 55.85 dengan predikat CC, sehingga dengan ini dapat ditarik Kesimpulan bahwa nilai index RB Kabupaten Mamuju Tengah telah memenuhi target tahun 2024.	Kabupaten Mamuju Tengah melakukan evaluasi dan memenuhi indikator Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2024
		NILAI LPPD	2,99			LPPD sudah dibuat dan ditetapkan tetapi belum dapat di analisis karena nilai lppd tahun 2024 belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri	
		OPINI BPK	WTP	WTP	100	Pengelolaan keuangan yang baik mencakup penganggaran yang efektif, pengeluaran yang terkendali, dan pengelolaan aset yang optimal untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Pemerintah Daerah (Pemda) perlu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang efektif, memperkuat pengendalian internal atas transaksi keuangan, melakukan rekonsiliasi secara berkala antara eksternal dan internal, serta menyusun laporan keuangan yang akurat dan lengkap sesuai dengan SAP. Komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan dan kemampuan SKPD dalam mengendalikan temuan yang merugikan daerah juga sangat penting.

6	Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan	100	100	100	Upaya dan strategi diterapkan berhasil secara optimal dalam mengurangi jumlah insiden gangguan ketertiban dan kemananan di Kab.Mamuju Tengah	a) Meningkatkan penegakan hukum b) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama c) Meningkatkan kualitas SDM personal d) Meningkatkan partisipasi masyarakat
7	Terpeliharabya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IkLhd)(Nilai)	79	73,32	92,82	Penyebab kegagalan karena masih terjadi pencemaran di beberapa aliran Sungai di kabupaten Mamuju Tengah	Melakukan sosialisasi pencegahan pencemaran di Daerah Aliran Sungai

- Dokumentasi kegiatan



	Rabat Beton Waeputeh	Indeks Insfrastrutur Daerah
	Penanganan long segment ruas jalan pasar baru	
	Rabat Beton Salugatta	

	Pembangunan talud jalan desa kombiling	
	Membangun rumah rakyat (membara), merupakan program unggulan daerah, lahir sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten mamuju Tengah, Dimana tingginya jumlah rumah tidak layak huni dan backlog.dengan adanya program membara ini capaian spm perumahan 3 tahun terakhir selalu pencapaiannya 100%. Adanya program membara dapat mewujudkan mimpi Masyarakat miskin,Masyarakat berpenghasilan rendah, korban bencana, memiliki rumah layak huni.	

Penanganan Prevelensi Stunting





Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan berbagai kegiatan untuk mencegah stunting, termasuk himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta intervensi sensitif stunting seperti Dashat, Lokakarya Mini Stunting, Rembuk Stunting, dan Tim Pendamping Keluarga Stunting, serta kegiatan pendukung lainnya seperti pemberian tablet tambah darah, skrining anemia, dan pemberian makanan tambahan lokal untuk ibu hamil dan balita bermasalah gizi. Inovasi "Genting" (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah STUNTING) di OPD KB, melalui pemberian makan bergizi kepada keluarga berisiko stunting, seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak baduta, dengan dukungan donasi dari Orang Tua Asuh.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan kinerja

No	Sasaran	Iku	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Untuk Pemerataan Pembangunan	Indeks Infrastruktur Daerah	73,10	Program penyelenggara jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten (%)	Menunjang
				Program Pengelola Dan pengembangan sistem air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan Jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten (%)	Menunjang
				Program penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase Kinerja lalu lintas dan Angkutan kabupaten/kota0	Menunjang
				Program kawasan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Tertangani	Menunjang
				Program pengembangan perumahan	persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan terkena dampak relokasi program pemerintah daerah	Menunjang
				Program penelitian dan pengembangan daerah	Cakupan Inovasi, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan	Menunjang

2	Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	101,58	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Menunjang
				Program pengelolaan Pendidikan	Rata-rata APM SD/MI, APM SMP/MTs, APM PAUD, dan APM Pendidikan Kesetaraan	Menunjang
		Prevalensi Stunting	80,5	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Menunjang
				Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh layanan perlindungan dan Jaminan sosial	Menunjang
				Program pengelolaan Pendidikan	Rata-rata APM SD/MI, APM SMP/MTs, APM PAUD, dan APM Pendidikan Kesetaraan	Menunjang
				Program Pengelola Dan pengembangan sistem air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipan dan bukan Jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten (%)	Menunjang
				Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Menunjang
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Angka Kemiskinan	50,67	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh layanan perlindungan dan Jaminan sosial	Menunjang
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi komoditas pertanian	Menunjang
		Tingkat Pengangguran Terbuka	105,5	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Menunjang
				Program perencanaan tenaga kerja	Persentase Rencana Tenaga Kerja	Menunjang
4	Perkembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri	Pertumbuhan Ekonomi	57,64	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi komoditas pertanian	Menunjang
5	Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	100	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kinerja dan Reformasi Birokras	Menunjang
		NILAI LPPD		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Capaian Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Menunjang
		OPINI BPK	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penurunan jumlah temuan hasil pengawasan	Menunjang
6	Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan	Persentase Penurunan Gangguan	100	Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan	Menunjang

	Ketenteraman Masyarakat	Ketertiban dan Keamanan			Masyarakat yang dapat di selesaikan	
7	Terpeliharaby a Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Iklhd)(Nilai)	92,82	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Cakupan Wilayah Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menunjang

7. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

N o	Sasaran	Iku	Indikator Kinerja Tahun 2024			Anggaran			Tingkat Efesiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Untuk Pemerataan Pembangunan	Indeks Infrastruktur Daerah	78,8	57,61	73,10	60.336.393.973	57.419.778.494	9,16	4,83
2	Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	67,46	68,53	101,58	133.823.608.275	117.987.033.600	88,1	11,83
		Prevalensi Stunting	14	16,73	80,5	150.961.786.853	133.711.748.807	88,57	11,42
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Msyarakat	Angka Kemiskinan	5,17	7,72	50,67	1.487.572.286	1.771.418.488	119,08	-19,08
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1,80	1,70	105,5	94.467.820	94.467.464	99,99	0,0003
4	Perkembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri	Pertumbuhan Ekonomi	5,17	2,98	57,64	1.539.047.877	1.496.861.000	97,25	2,74
5	Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	100	115.381.504	115.381.504	100	0
		NILAI LPPD	2,99			221.042.561	180.924.121	81,85	18,14
		OPINI BPK	WTP	WTP	100	4.302.293.596	4.152.688.743	96,52	3,47
6	Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan	100	100	100	2.550.600.000	2.912.607.460	114,19	-14,19
7	Terpeliharabya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragama n Hayati Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Iklhd)(Nilai)	79	73,32	92,82	86.790.918	74,323,000	85,63	14,36

3.2 Akuntabilitas Keuangan

No	Program	Anggaran	Realisasi
1	Program Penyelenggara Jalan	Rp. 43.863.886.074	Rp.40.442.458.331
2	Program Pengelola Dan Pengembangan Sistem Air Minum	Rp. 17.337.373.025	Rp.15.450.157.719
3	Program Penyelenggara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Rp. 525.986.098	Rp. 349.306.187
4	Program Kawasan Permukiman	Rp. 211.579.699	Rp. 260.496.100
5	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 167.354.332	Rp. 188.033.182
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 103.186.267.247	Rp.64.713.538.269
7	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 55.718.947.533	Rp.53.273.495.331
8	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 39.724.410	Rp. 39.724.410
9	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 54.743.410	Rp.54.743.054
10	Program Perlindungan Dan Jaminan Social	Rp. 152.858.497	Rp.274.557.488
11	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 1.334.713.789	Rp.1.496.861.000
12	Program Peningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.550.600.000	Rp.2.912.607.460
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.14.697.372.303	Rp.14.697.372.303
14	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp. 591.857.162	Rp.729.326.975
15	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 86.790.918	Rp.74,323,000

BAB IV

PENUTUP

Dengan demikian, LKJIP Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini telah menyajikan capaian kinerja yang telah dicapai dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKJIP ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan strategis dan melakukan perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan LKJIP ini, diharapkan Kabupaten Mamuju Tengah dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. LKJIP Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan melakukan pembangunan daerah.

LAMPIRAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nomor : 13 / 007.1 / I / 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ARAS TAMMAUNI

Jabatan : BUPATI MAMUJU TENGAH

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mamuju Tengah, 02 Januari 2024

BUPATI MAMUJU TENGAH,

H. ARAS TAMMAUNI

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA	TARGET
1	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Untuk Pemerataan Pembangunan	Indeks Infrastruktur Daerah	78,08
2	Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	67,46
		Prevalensi Stunting	14
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Angka Kemiskinan	5,17
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1,80
4	Perkembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kota Terpadu Mandiri	Pertumbuhan Ekonomi	5,17
5	Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	CC
		NILAI LPPD	2,99
		OPINI BPK	WTP
6	Terpeliharanya Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan	100
7	Terpeliharabya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Iklhd)(Nilai)	79

No	Program	Anggaran
1	Program Penyelenggara Jalan	Rp. 43.863.888.074
2	Program Pengelola Dan Pengembangan Sistem Air Minum	Rp. 17.337.373.025
3	Program Penyelenggara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Rp. 525.988.098
4	Program Kawasan Permukiman	Rp. 211.579.899
5	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 167.354.332
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 103.186.267.247
7	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 55.718.947.533
8	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 39.724.410
9	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 54.743.410
10	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp. 152.858.497
11	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 1.334.713.789
12	Program Peningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.550.800.000
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 14.897.372.303
14	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp. 591.857.162
15	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 86.790.918

Mamuju Tengah, 02 Januari 2024

BUPATI MAMUJU TENGAH,

 H. HARAS TAMMAUNI



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
INSPEKTORAT

Alamat : Jln.Poros Mamuju – Palu ,Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah 91563
Email : inspektoratmateng89@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tanggungjawab kami terbatas pada hasil reviu berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Hasil Reviu ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Rekomendasi Hasil Reviu Sebagaimana terlampir.

Demikian hasil reviu ini disampaikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Topoyo, 26 Maret 2025

INSPEKTUR

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH



DR. HENRI MARIA K, S.Ag., M.Pd., MM., CGCAE., CIPA., CGRS

Pembantu Utama Muda/ IV.c

NIP. 19731010 200003 1 005